



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar
Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Jawa Barat (Studi Kasus BandungTV)**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Hanny Reviyani Iskandar

2013310039

Bandung

2018



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program
Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat
(Studi Kasus BandungTV)**

Skripsi

Oleh

Hanny Reviyani Iskandar

2013310039

Pembimbing

Dr. Indraswari

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Hanny Reviyani Iskandar
Nomor Pokok : 2013310039
Judul : Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (Studi Kasus Bandung TV)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 10 Januari 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si : _____

Sekretaris

Dr. Indraswari : _____

Anggota

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si : _____

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Pernyataan

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hanny Reviyani Iskandar
NPM : 2013310039
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (Studi Kasus Bandung Tv)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, Desember 2018

Hanny Reviyani Iskandar

ABSTRAK

Nama : Hanny Reviyani Iskandar
NPM : 2013310039
Judul Skripsi : Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (Studi Kasus Bandung TV)

Tujuan penelitian ini adalah “Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (Studi Kasus Bandung TV).” Kebijakan penyiaran merupakan peraturan yang mengatur lembaga-lembaga penyiaran baik swasta maupun milik negara yang dilaksanakan khususnya oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan teori Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh faktor *content* dan *context* kebijakan. Selain itu Grindle juga menyebutkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif saja namun juga aspek politis yang mempengaruhi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi pengawasan di lapangan (KPID Jawa Barat dan Bandung TV), wawancara kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung TV, Penonton Bandung TV, serta Mahasiswa yang melakukan magang di KPID, bersama 25 responden dan studi dokumen Undang-undang No 32 Tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Analisis data dilakukan secara deskriptif yang digunakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implemtasi kebijakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran / P3SPS oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat di Bandung TV belum berjalan optimal. Hal tersebut diakibatkan rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, seperti alat pemantau dan televisi yang dipakai untuk memantau isi siaran, dalam variabel *content* sumber daya adalah hal yang penting untuk menunjang implementasi kebijakan.

ABSTRACT

Name : Hanny Reviyani Iskandar

Number of Student : 2013310039

Title of Thesis : *The Implementation of Broadcasting Behavior Guidance and Standard of Broadcasting Program by Broadcasting Commission of Indonesia in West Java (Case Studies of Bandung TV)*

The title of this research is The Implementation of Broadcasting Behavior Guidance and Standard of Broadcasting Program by Broadcasting Commission of Indonesia in West Java (Case Studies of Bandung TV). Broadcasting policy is a regulation that regulate the broadcasting institutions, both private and public that implemented particuraly by The Indonesian Broadcasting Commission of West Java. This study uses Grindle's theory which state that the successful implementation of policies determined by the content factor and context. In addition, Grindle mentioned that the implementation of a policy is not only determined by the administrative aspects but also political aspects that affects it.

This type of study is a descriptive, using the techniques of collecting data through surveillance observation in the field (The Indonesian Broadcasting Commission of West Java and Bandung TV), interviews with the The Indonesian Broadcasting Commission of West Java, Bandung TV, Bandung TV Viewers, and Students who do internships in the KPID, with with 25 respondents and study documents of Law No. 32 of 2002 and Broadcasting Behavior Guidance and Standard of Broadcasting Program. Data analysis was performed descriptively in order to obtain a deep understanding of the research object

The results of the study show that the implementation of the Broadcasting Behavior Guidance and Standard of Broadcasting Program by Broadcasting Commission of Indonesia in West Java in Bandung TV has not run optimally. This was due to the low level of supervision carried out by Broadcasting Commission of Indonesia in West Java Commission, the lack of adequate facilities and infrastructure, such as monitors and televisions used to monitor broadcast content, in the variable content of resources is important to support policy implementation.

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul “Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (Studi Kasus BandungTV).”

Dalam penulisan skripsi, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Indraswari, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan serta mengarahkan penulis selama penyusunan maupun penulisan skripsi.
2. Kedua Orang Tua yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
3. Hanna dan Gita yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis.
4. Maria Echa, yang telah menjadi teman diskusi dan membantu memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
5. Untuk anggota Peraya Team Bandung yang sudah membantu, mendukung penulis selama pembuatan skripsi.
6. Untuk Nakama OP Bandung yang selalu menghibur penulis saat penulis kehilangan semangat untuk melanjutkan penulisan.
7. Nadira yang sudah membantu agar penulis dapat melakukan penelitian di Bandung TV dan KPID Jawa Barat

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari-Nya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kekurangan semoga dapat menjadi masukan bagi penulis untuk kesempurnaan tulisan berikutnya. Harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat dan informasi kepada siapapun yang membacanya.

Bandung, 2018

Penulis,

Hanny Reviyani Iskandar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Identifikasi Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Kegunaan Penelitian	9
BAB II Kerangka Teori	10
2.1 Konsep Administrasi Publik	10
2.2 Pengertian Kebijakan Publik	12
2.3 Pendekatan dan Perspektif Implementasi Kebijakan Publik	13
2.4 Implementasi Kebijakan Publik	16
2.5 Model Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle	25
2.6 Model Penelitian	26
2.7 Operasional Variabel	27
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Tipe Penelitian	34
3.2 Peran Peneliti	37

3.3 Lokasi Penelitian	37
3.4 Sumber Data.....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6 Analisis Data	41
BAB IV LATAR BELAKANG DAN PROFIL	43
4.1 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat	43
4.2 Bandung TV	50
BAB V PEMBAHASAN DAN ANALISIS	55
5.1 Pendahuluan	55
5.2 Faktor <i>Content</i> dan <i>Context</i> Implementasi Kebijakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran / P3SPS yang Mempengaruhi Kegiatan Pengawasan Penyiaran Oleh KPID Jawa Barat di Bandung TV.	58
5.3 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Oleh Komisi penyiaran Indonesia daerah jawa Barat.....	84
5.4 Implementasi Kebijakan Penyiaran Oleh Koomisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.....	87

5.5 permasalahan dalam melaksanakan kebijakan penyiaran oleh KPID Jawa Barat tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran / P3SPS di Bandung TV	89
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
6.1 Kesimpulan	94
6.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	103

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Model Implementasi Menurut Marille S Grindle

Gambar 2.1 Modifikasi dari Model Implementasi Menurut Marille S Grindle

Gambar 5.5 Kegiatan pengawasan di KPID Jawa Barat

Gambar 5.6 Sistem implementasi kebijakan penyiaran

Tabel 5.3 Komposisi Jumlah Sumber Daya Manusia KPID Jawa Barat Tahun
2018

Tabel 5.4 Sarana dan Prasarana di KPID Jawa Barat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi dapat dinikmati melalui media massa. Media massa sangat berperan penting dalam menginformasikan serta mensosialisasikan suatu informasi kepada masyarakat. Komunikasi massa merupakan proses penyampaian dari suatu sumber kepada masyarakat yang berjumlah besar, dengan menggunakan saluran media massa.

Pengaruh yang diserap manusia melalui media komunikasi baik elektronik maupun cetak mempunyai sisi positif dan negatif. Salah satu sumber informasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat adalah televisi. Televisi merupakan salah satu media komunikasi.

Televisi mengalami perkembangan secara dramatis, terutama melalui pertumbuhan televisi kabel. Transmisi program acara televisi kabel menjangkau seluruh pelosok negeri dengan bantuan satelit dan diterima langsung pada layar televisi di rumah dengan menggunakan *wire* atau *microwire* (*wireless cables*) yang membuka tambahan saluran televisi bagi pemirsa. Televisi tambah marak lagi setelah di kembangkannya *Direct Broadcast Satellite (DBS)*.

Televisi akan memiliki pengaruh besar terhadap pecandunya (*heavy viewers*) daripada terhadap penonton biasa (*light viewers*). Pengaruh televisi ini lebih pada aspek sikap (*attitude*) ketimbang perilaku (*behavior*) manusia. Bagi pecandu televisi, dalam dirinya akan tertanam sikap yang konsisten (sejalan) dengan apa yang ditontonnya dalam acara televisi ketimbang persepsinya dengan dunia nyata. Menonton televisi akan menghasilkan *mindset* tentang kejahatan, misalnya, ketimbang perilaku kejahatan.

Televisi membawa berbagai kandungan informasi, dimana pesan-pesannya dalam kecepatan tinggi menyebar ke seluruh tempat yang dengan mudah diterima tanpa meributkan fasilitas yang terlalu beragam. Hal ini membuat masyarakat bisa secara langsung mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa membutuhkan waktu yang lama. Peran televisi saat ini sedemikian penting dan dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadikan daya tarik menonton pada masyarakat demikian meningkat semakin tinggi.

Siaran televisi dapat mempengaruhi sifat dasar pendidikan dan mengurangi kemampuan masyarakat dalam percakapan secara langsung. Meski demikian, yang masyarakat lakukan hanya duduk dihadapan televisi dan menyaksikan sesuatu yang ditayangkan, belum banyak masyarakat yang mampu menilai dan mengambil aksi untuk memilah acara yang layak ditonton dan pendamping saat menonton bersama.

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Semangat yang diusung dalam undang-undang tersebut adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas. Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik.

Bandung TV adalah TV lokal pertama yang ada di Bandung serta TV lokal yang paling mengutamakan nilai lokal diantara stasiun tv lokal lainnya, seharusnya sudah paham akan peraturan yang sudah ditetapkan tetapi masih saja di temukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Bandung TV seperti menayangkan iklan pembalut pada jam anak yang seharusnya tidak dilakukan.

Berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran pasal 14 dijelaskan bahwa “Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran. Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.”

Dalam menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Peraturan ini mencakup semua kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendidikan, operasional, pertanggungjawaban dan evaluasi.

Dalam implementasi yang dilakukan oleh komisi penyiaran indonesia terhadap media televisi, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang terdapat dalam Undang-Undang no 32 Tahun 2002. Dalam undang-undang penyiaran terdapat pasal 48 mengenai pedoman perilaku penyiaran, yang mengatur bagaimana siaran yang di yang baik, dan Komisi Penyiaran Indonesia mengeluarkan peraturan yang dimasukkan dalam Pedoman Peraturan Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) pada tahun 2012.

Sesuai dengan Undang-undang No 32 Tahun 2002 bahwa KPI berhak menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran maka di buatlah

pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) yang berguna untuk menjadi panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam menyelenggarakan penyiaran dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia.

Terdapat berbagai hal penting menurut Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), sebagai contoh diantaranya:

1. Bab IV Penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antar golongan
2. Bab V Penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan
3. Bab VII Pelindungan kepentingan publik
4. Bab VIII Layanan Publik
5. Bab XII dan Bab XIII Program siaran seksual dan program siaran kekerasan
6. Bab XIV Program siaran terkait rokok, napza dan minuman beralkohol
7. Bab XVIII Tentang perekaman tersembunyi
8. Bab XX Bahasa bendera lambang negara dan lagu kebangsaan
9. Bab XXIX Siaran pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan peraturan penyiaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat di implementasikan di BandungTV. Disini peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Jawa Barat sangatlah penting pada saat jalannya penyiaran program acara di BandungTV, dimana tugas dari Komisi Penyiaran Indonesia itu adalah menghormati asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian hukum, asas keamanan, asas keberagaman dan asas lainnya.

Peneliti membahas dan menganalisis permasalahan tersebut dari implementasi kebijakan Marillr S. Grindle, teori ini dianggap sesuai dengan penelitian yang di teliti, teori Grindle menilai suatu keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*).¹

Dalam teori ini Grindle menyebutkan bahwa implementasi dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik, yang didalam nya terdapat berbagai kepentingan. Teori ini dianggap sesuai dan tepat digunakan dalam mengkaji mengenai penyelenggaraan implementasi yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa barat untuk melihat bagaimana berbagai kepentingan memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Didalam pelaksanaan kebijakan tentunya terdapat pelaksana program serta sumber daya yang mendukung. Pelaksanaan kebijakan ini mempunyai tujuan perubahan dan manfaat yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan isi (*content of policy*) suatu implementasi kebijakan.

¹ Abdullah Ramdhani, 'Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik' diakses dari <http://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1/1> pada tanggal 27 september 2017 pukul 15.32 wib

Grindle juga berpendapat bahwa untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan, dapat dilihat dari dua hal yaitu :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai.

Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:

- a. Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
- b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran dengan judul **“Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (Studi Kasus BandungTV)”**

1.2 Rumusan Masalah

Komisi Penyiaran Indonesia selaku pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap stasiun televisi, serta memiliki peran penting dalam setiap tayangan yang disiarkan di televisi. Untuk itu agar dapat melihat bagaimana implementasi undang-undang penyiaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat pada BandungTV dirumuskanlah sebuah pertanyaan yaitu

“ Bagaimana “Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (Studi Kasus BandungTV)”

1.3 Identifikasi Masalah

Untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi undang-undang penyiaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat pada BandungTV, maka diperlukan teori yang dapat digunakan sebagai patokan dalam penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Marillr S. Grindle, teori ini dianggap sesuai dengan penelitian yang di teliti, teori Grindle menilai suatu keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*). Oleh karena itu peneliti merumuskan masalah kedalam beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat ditinjau dari aspek *content* kebijakan?
2. Bagaimana Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat ditinjau dari aspek *context* kebijakan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat ditinjau dari aspek *content* kebijakan
2. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat ditinjau dari aspek *content* kebijakan

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

1. Manfaat di dalam hal komunikasi penyiaran guna mengembangkan ilmu administrasi publik mengenai implementasi kebijakan
2. Diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat menjadi bahan pertimbangan KPID dalam pengelolaan pengawasan isi siaran

1.5.2 Kegunaan Praktis

Dapat mengetahui jalannya suatu implementasi di dalam suatu lembaga. Dan dapat melihat berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang dibuat, serta dapat mengetahui secara langsung tentang implementasi kebijakan, khususnya kebijakan penyiaran yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat.